

Perempuan, Abdurrahman Wahid dan Kepemimpinan Perempuan dalam Manajemen Pendidikan Agama Islam

Erma Fatmawati
Dosen IAI Ibrahimy Genteng

Abstract: *Islam in principle upholds equality and doesn't distinguish people by sex. However, not infrequently Islamic thought products often position women as subordinate in this regard. This research is based on library research with the type of research using content analysis. This research study deals with the interpretation of patriarchal culture, discriminatorily understood religious texts and state policies that are not gender sensitive to perpetuate the reality of marginalized women. This paper aims to examine the legality of women leadership from the perspective of Abdurrahman Wahid or Gus Dur. The conceptual framework begins with maslahah theory, with primary data sources consisting of Gus Dur's thoughts, while secondary data are references related to the theme raised. The result shows that the concept of Islam in feminism with Gus Dur's relation to gender can strengthen various women's activities in the public sphere in the presence of capability, integrity and maintain balance with their domestic role.*

Keywords: Islam Feminism, Woman, Abdurrahman Wahid

Korespondensi: Erma Fatmawati
IAI Ibrahimy, Dusun Krajan, Genteng Wetan, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, 68465
ermafatmawati@gmail.com

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*) yang hakikat kehidupannya adalah sosial politik yang saling berinteraksi antara dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan sosial dan politik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sebagai bagian dari *zoon politicon* menurut Plato, manusia secara individu merupakan elemen terkecil dalam sebuah Negara. Sehingga, Manusia sebagai *zoon politicon* membutuhkan sebuah wadah atau organisasi untuk mengekspresikan pemikiran dan keinginan-keinginan politiknya tersebut.

Namun, politik selama ini selalu identik dengan dunia laki-laki, dengan sesuatu yang kotor, yang tidak pantas dimasuki oleh kaum perempuan. Politik identik dengan sesuatu yang aneh dari pandangan feminitas, karena politik terkait dengan kekuasaan dan kesewenangan. Budaya patriarki menempatkan perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pengasuhan, pendidik, dan penjaga moral. Sementara itu, peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah.¹ Perpanjangan dari berbagai peran yang dilekatkan pada perempuan tersebut maka, arena politik yang sarat dengan peran pengambil kebijakan terkait erat dengan isu-isu kekuasaan identik dengan dunia laki-laki. Apabila perempuan masuk ke panggung politik kerap dianggap sesuatu yang kurang lazim atau tidak pantas bahkan arena politik dianggap dunia yang keras, sarat dengan pesaing bahkan terkesan sangat ambisius.

Selain itu, dalam sebuah negara, perempuan merupakan salah satu elemen penting sebuah negara yang termasuk dalam anggota masyarakat. Maka tidak heran jika kita sering mendengar sebuah ucapan “dibalik seorang laki-laki yang hebat, pasti ada seorang perempuan yang hebat di belakangnya”, maka pemberdayaan terhadap politik perempuan merupakan sebuah solusi yang serius agar perempuan dapat memfungsikan dirinya dalam kehidupan politik berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam bidang yang mampu dilakukannya.

Seiring perkembangan pembahasan mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, kesadaran perempuan Indonesia untuk mengangkat derajatnya sudah semakin tumbuh. Perempuan juga mengalami berbagai kemajuan dan menunjukkan peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas dibidang pendidikan, sosial, dan ketenagakerjaan meski

¹ Albert Rika Pratiwi, dkk, *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*, (Yogyakarta. Kanisius. 1998), hlm. 8.

belum secara signifikan. Para aktivis feminisme mulai mengubah haluan otoritas mereka. Bukan hanya ingin agar dunia memberikan kebebasan bagi perempuan dalam membentuk karier atau pekerjaan sebagai seorang perempuan, melainkan kini mereka berusaha untuk menyuarakan keinginan mereka agar dunia memberikan kebebasan untuk berkecimpung di dunia politik, bahkan juga layak untuk berdiri sebagai pemimpin yang sah secara politik.

Seperti adanya Kongres perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928 menandai bahwa kesadaran politik perempuan Indonesia mulai tumbuh. Kemudian diikuti munculnya sejumlah organisasi perempuan sampai pada masa kemerdekaan, seperti Perwani dan Kowani. Partisipasi nyata dan dijaminnya hak-hak perempuan tercermin pada pemilu 1955 dimana perempuan Indonesia berhak untuk dipilih dan memilih.² Meskipun demikian, partisipasi perempuan pada lembaga politik formal representasinya masih sangat terbatas.

Masalah kepemimpinan perempuan adalah sebuah persoalan yang paling ‘aktual’ untuk terus diperbincangkan, salah satunya yaitu dalam persamaan gender atau paham feminin. Feminisme merupakan sikap politik yang diambil untuk melihat relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang dianggap timpang. Ketimpangan itu hadir dan disadari sebagai suatu bentuk konstruksi sosial yang terus hidup dalam kebudayaan dan ideologi. Di dalamnya sekaligus ada kebutuhan untuk resistan terhadap wacana yang didominasi oleh budaya, ras dan jenis kelamin tertentu.

Konstruksi sosial yang selama ini hadir di masyarakat tentunya menimbulkan banyak problematika sendiri terhadap gender³. Problematika gender yang muncul biasanya terkait dengan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan, dan terjadi hampir di semua bidang; mulai dari tingkat internasional, negara, keagamaan, sosial, politik, budaya, ekonomi, bahkan sampai pada tingkat rumah tangga.⁴ Seperti yang dikhawatirkan banyak orang, paham ini telah memasuki dunia Islam atau negara-negara yang notabene penduduknya mayoritas beragama Islam. Perkembangan tentang paham-paham feminisme ini tentunya menuai banyak kecaman dari kalangan muslim.

² Jendrius, *Rekonstruksi Peran Perempuan dalam Politik*, (Jurnal Antropologi Vol.8, 2004), hlm. 85-86.

³ Kosa kata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Gender adalah sifat dan perilaku yang dibentuk secara sosial yang disematkan pada perempuan dan laki-laki. Gender dapat diartikan sebagai karakteristik sosial, psikologis dan perilaku yang diasosiasikan dengan perbedaan jenis kelamin laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminim).

⁴ *Ibid.*, 5.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Judith Squires dalam bukunya *Gender in Political Theory*, mengurai bahwa ketika kita menyebut gender, maka identik dengan suatu bentuk secara kultur atau budaya yang mendefinisikan sebuah karakteristik yang dikonstruksi secara sosial, kemudian dialamatkan pada salah satu pihak dan dalam hal ini adalah perempuan.⁵ Tak heran, paham yang mengusung perempuan sebagai kunci kemajuan pun menimbulkan masalah-masalah yang lebih pelik. Termasuk wacana tentang feminisme yang selalu kontekstual dan menjadi perdebatan yang tidak pernah berakhir.

Dalam Islam, segala persoalan dan peraturan-peraturan dalam segala aspek kehidupan dan berbagai bidang telah diatur dalam Alquran, termasuk dalam hal mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan yang telah ditegaskan secara eksplisit di dalamnya. Meskipun demikian, masyarakat muslim secara umum tidak memandang dengan demikian. Akar mendalam yang mendasari penolakan dalam masyarakat muslim adalah keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk Allah yang lebih rendah karena diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Selain itu, perempuan dianggap sebagai makhluk yang kurang akalunya sehingga harus selalu berada dalam bimbingan laki-laki.

Feminisme merupakan salah satu produk kebudayaan Barat, sehingga tidak heran jika ada sebagian orang memandang feminisme identik dengan westernisasi. Namun, Gus Dur mengingatkan agar kita tidak terjebak pada peleburan budaya Barat atau Timur. Gus Dur mengajak kita berpikir kritis dan terbuka. Setiap ide dan gagasan dari mana pun datangnya, harus direspons secara proporsional. Artinya, harus dibaca secara kritis dan terbuka untuk selanjutnya mengambil segi-segi positif dan konstruktif, sebaliknya dengan membuang segi-segi negatif dan destruktif.⁶ Tentu saja sebagai umat Islam, kita tetap menggunakan perspektif yang universal, yakni ajaran yang bertumpu pada prinsip keadilan, kemaslahatan, pluralis dan humanis.

Melihat teori Alquran yang mengajarkan konsep kesetaraan bagi setiap umatnya dengan merebak serta mengakarnya isu gender itulah, maka sangat perlu adanya ulasan yang mendalam. Tulisan ini mencoba menafsirkan dan menguak adanya budaya patriarki dalam analisis psikologi dan ajaran Islam dalam menginterpretasikan manusia, di mana perempuan acapkali dimarginalkan. Dalam hal ini terfokus pada legalitas kepemimpinan perempuan

⁵ Liza Hadiz, Lihat kata pengantar dalam buku *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Kumpulan Artikel Prisma* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004), x-xi.

⁶ Musdah Mulia, *Pioner Gerakan Feminisme Dalam NU*, 2-3.

dari perspektif Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian dianalisis sedemikian rupa secara ilmiah guna mendapatkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggung-jawabkan.

BIOGRAFI SINGKAT ABDURRAHMAN WAHID

Abdurrahman Addakhil, demikian nama lengkapnya. Secara leksikal, “Addakhil” berarti “Sang Penakluk”, sebuah nama yang diambil Wahid Hasyim, orang tuanya dari seorang perintis Dinasti Umayyah yang telah menancapkan tongkat kejayaan Islam di Spanyol. Belakangan kata “Addakhil” tidak cukup dikenal dan diganti nama “Wahid”, KH. Abdurrahman Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur.⁷ KH. Abdurrahman Wahid adalah putra pertama dari enam bersaudara⁸ yang dilahirkan di Denayar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940.

Secara genetik, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah keturunan dari keluarga terhormat atau lebih dikenal dengan sebutan “darah biru”.⁹ Ayah Gus Dur adalah KH. Wahid Hasyim, dilahirkan di Tebu Ireng Jombang Jawa Timur pada bulan Juni 1914. Ia adalah putra pertama dari anak kelima dari sepuluh bersaudara, pendiri jami’yah Nahdlatul Ulama (NU)-organisasi masa Islam tersebar di Indonesia bahkan barang kali di dunia, melalui jumlah anggota sedikitnya 40 juta orang¹⁰ dan pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang¹¹ dan ibunya, Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri Pesantren Denayar Jombang, KH. Bisri Syamsuri. Kakek dari ibunya juga merupakan tokoh NU, yang menjadi Rais ‘Aam PBNU setelah KH. Abdul Wadab Haabullah. Dengan demikian, Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama NU sekaligus, dan tokoh bangsa Indonesia.¹² Karena kebesarannya pula, Gus Dur sering disebut sebagai *al-karim ibn al-karim ibn al-karim* (yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia).¹³

⁷ Penamaan Abdurrahman al-Dakhil dinisbahkan kepada seseorang yang pernah memegang kekuasaan selama 32 tahun, Dari tahun 756-788 di Spanyol. Adalah seorang pelarian yang menyeberangi daratan tandus dan bukit batu, memasuki negeri sebagai orang asing yang tersisih. Namun ia kemudin berhasil membangun kekuasaan, kemakmuran negeri, menyusun tentara dan mengatur pemerintahan. Gus adalah kependekatan dari bagus yang kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lihat Tim INCRes, *Beyond The Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 26.

⁸ Enam bersaudara itu adalah Abdurrahman Wahid (1940), Aisyah (1941), Salahuddin (1942), Ummar (1944), Chodijah (1948), Hasyim (1953)

⁹ Nandirotul Umah, *Pendidikan Islam di Indonesia Dalam Prespektif Gus Dur* (Yogyakarta: Salatiga, 2014), 13.

¹⁰ Nandirotul Umah, *Sketsa Biografi dan Intelektual Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: Salatiga, 2014), 15.

¹¹ Moh. Badrus Sholeh, *Mengenal Pemikiran Gus Dur* (Jember: YPI At-Tauhid Press, 2013), 13.

¹² Egi Septiana, *Catatan Gusdur* (Bandung: PersEbook369), 6.

¹³ Abdul Wahid Hasan, *Gus Dur Mengarungi Jagat Sepiritual Sang Guru Besar* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 104.

Lebih dari itu, Gus Dur adalah keturunan Brawijaya IV (Lembu Peteng), yakni Ki Ajeng Tarub I dan Joko Tingkir.¹⁴ Pada waktu itu, bersama Ir. Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia dan kawan-kawan ayah Gus Dur termasuk salah satu tokoh perumus Piagam Jakarta. Ia pun pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada masa Republik Indonesia Serikat. Meskipun demikian, sejarah kehidupan Gus Dur tidak mencerminkan kehidupan seorang ningrat, ia berproses dan hidup sebagaimana layaknya masyarakat pada umumnya. Selain itu, Gus Dur masih memiliki garis silsilah keturunan yang bersambung kepada Rasulullah Saw., merupakan keturunan ke-30 dari beliau melalui jalur KH. Hasyim Asy'ari.¹⁵

Pernikahan Gus Dur dengan Sinta Nuriyah berlangsung pada 11 Juli 1968 di Tambak Beras Jombang.¹⁶ Ayahnya sering melibatkan Gus Dur dalam berbagai pertemuan yang diadakan secara teratur dengan para aktivis muda, mahasiswa, dan tokoh-tokoh lain di Jakarta, termasuk Munawir Sjadzali yang ketika itu masih muda.¹⁷ Tidak mengherankan jika pada tahap ini Gus Dur tumbuh menjadi anak yang haus ilmu pengetahuan. Meskipun ayahnya seorang menteri dan tokoh terkenal, Gus Dur tidak sekolah di lembaga pendidikan elite yang bisa dimasuki oleh anak pejabat di Jakarta, tidak juga bersekolah di sekolah pendidikan agama, Gus Dur bersama ke enam adiknya masuk pada Sekolah Rakyat (SR).¹⁸

Pasca ayah Gus Dur meninggal dunia akibat kecelakaan mobil, ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) di Tanah Abang pada tahun 1954, sambil mondok di Krapyak Yogyakarta. Ia bertemu dengan seorang guru bahasa Inggris yang bernama Rufi'ah. Melalui guru ini Gus Dur belajar bahasa asing dan banyak berkenalan dengan buku-buku karya tokoh-tokoh besar dalam bahasa Inggris, seperti karyanya Ernest Hemingway, John Stein, Y. Gasset, Pushkin, Tolstoy, Dostoevsky dan Mikhail Sholokov, Wiill (*The Story Of Civilization*) ia juga aktif mendengarkan siaran

¹⁴ Dari pihak ayahnya, melalui garis neneknya (Ny. Nafiqoh, istri KH. Hasyim Asy'ari), garis keturunannya bersambung sampai pada Ki Ajeng Tarub I. Sedangkan dari pihak ibu, garis keturunannya bersambung ke Jaka Tingkir atau Sultan Adiwijaya, Raja pertama Kesultanan Pajang (1549-1582). *Ibid.*, 105.

¹⁵ Moh. Badrus, *Op.Cit.*, 15.

¹⁶ Meskipun pernikahan yang berlangsung diwakili oleh kakeknya karena ia masih berada di Irak dalam menyelesaikan kuliahnya yang pada akhirnya pernikahan tersebut dikaruniai empat anak. Moh. Badrus, *Op.Cit.*, 18.

¹⁷ Greg Barton, *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LkiS, 2011), 41.

¹⁸ Pada tahun 1944 Gus Dur pindah ke Jakarta. Masyumi adalah organisasi dukungan dari tentara Jepang yang pada saat itu menduduki Indonesia. Gus Dur dan ke enam adiknya masuk Sekolah Rakyat (SR), ialah sebuah sekolah bentukan pemerintah Hindia untuk anak-anak pribumi atau SD KRIS yang 118 terletak di jalan Samratulangi sekarang. Moh. Badrus, *Op.Cit.*, 32.

lewat radio Voice Of America dan BBC London. Sejauh itu ia menyampaikan laporan bacaannya kepada guru bahasa Inggrisnya.¹⁹

Pada tahun 1964, Gus Dur melanjutkan studinya di Al-Azhar Islamic University Mesir. Sebagian besar waktunya di Mesir dihabiskan di ruang perpustakaan, terutama American University Library, sebuah perpustakaan terlengkap di kota itu. Karena merasa tidak puas dengan sistem pengajaran di Al-Azhar, maka pada tahun 1970, ia meninggalkan Kairo untuk melanjutkan studinya di fakultas seni Universitas Baghdad. Gus Dur selama di sinilah merasa puas dan telah menemukan apa yang sesuai dengan panggilan jiwanya yang modernis. Perkuliahan di Baghdad ini ia tempuh dengan menyelesaikan ujian strata 2 (S2).²⁰

Pada tahun 1979 dan seterusnya, ia juga sudah melibatkan diri secara aktif dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama dengan jabatan sebagai Katib Awal Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Gus Dur adalah bertindak sebagai pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, mulai tahun 1979 dan pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Denanyar, Jombang tahun 1996. Pada saat itu juga sebagai Anggota Dewan Kehormatan Universitas Saddam Husein, Baghdad, dan selanjutnya sebagai Manggala Badan Pembina Pelaksana Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).

Di samping itu, Gus Dur juga pernah menjabat Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Mesir dari tahun 1964-1970, Konsultan Departemen Koperasi, Departemen Agama serta Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam) pada tahun 1976, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tahun 1984-1989, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Karya Pembangunan tahun 1987-1992, anggota Dewan Internasional Perez Center for Peace (PCP) atau Institut Shimon Perez untuk perdamaian di Tel Aviv Israel sebagai Presiden World Conference of Religion and Peace (WCRPO) sejak tahun 1994-1999, anggota Komisi Agama-Agama Ibrahim di Madrid Spanyol, deklarator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Cianjur, Jakarta, 1998 berasa KH. Ilyas Ruhayat, KH. Muhith Muzadi, KH. Munasir Ali dan KH. Mustofa Bisri dan sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999-2001.²¹

¹⁹Nandirotul Umah, *Sketsa Biografi.... Op.Cit.*, 14.

²⁰Nandirotul Umah, *Sketsa Biografi.... Op.Cit.*, 15-16.

²¹Nandirotul Umah, *Sketsa Biografi.... Op.Cit.*, 18.

KONSEP ISLAM FEMINISME : DAN KEPEMIMPINAN ISLAM

Istilah feminis dan feminisme selain terasa asing juga masih mendapat penolakan yang kuat dari sebagian besar umat Islam. Mengapa?, karena kedua istilah tersebut sudah terlanjur mendapat pemaknaan yang negatif atau dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Feminisme dimaknai sebagai perlawanan perempuan terhadap kodrat, permusuhan terhadap laki-laki, pemberontakan terhadap kewajiban rumah tangga, bahkan dianggap sebagai penolakan terhadap syariah.²²

Islam memandang sama kepada perempuan dan laki-laki dari segi kemanusiaannya. Perempuan adalah manusia sebagaimana laki-laki. Islam memberi hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki dan membebaskan kewajiban yang sama kepada keduanya, kecuali terdapat dalil syara yang memberi tuntutan dan tuntunan khusus untuk perempuan dan laki-laki, yang jumlahnya sangat sedikit. Begitupun mayoritas dalil syara tidak diciptakan khusus untuk perempuan atau khusus untuk laki-laki, melainkan untuk keduanya sebagai insan (Q.S. al-Hujurat [49] ayat 13; Q.S. al-Najm [53] ayat 45; Q.S. al-Qiyamah [75] ayat 39).²³

Perempuan dan laki-laki telah diberi potensi yang sama untuk dapat berkiprah dan beramal secara sinergis dalam asas kemitraan, kerja sama, saling tolong menolong, saling mendukung, saling memberi penguatan dalam suatu kehidupan di masyarakat (Q.S. an-Nisa [4] ayat 7, 32-34, 155).²⁴ Pola kehidupan sinergis itu sudah menjadi sunatullah dalam setiap komunitas, kurun dan generasi manusia karena Allah menciptakan kemanusiaan manusia yang saling bergantung (*interdependency*), saling berhubungan (*interconnection*) dan saling melengkapi (*intercomplementary*). Tidak ada seorang manusia pun yang sempurna, lahir dan dapat hidup sendiri tanpa kehadiran manusia lain (Q.S. al-Nisa [4] ayat ; Q.S. al-A'raf [7] ayat 189).²⁵

Ada beberapa konsep yang mengatur hubungan antara keduanya. Salah satunya adalah teori *nature* dan *nurture*. Teori *nature* menyatakan bahwa secara biologis laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan sejak lahir di mana perbedaan ini tidak dapat dipertukarkan

²² Musdah Mulia, *Op.Cit.*, 7.

²³ Shohih Bukhori, Juz 82 dan sunan Tirmidzi, Bab al-Fitan, 75.

²⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: Lkis, 2004), 91.

²⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. ke-6 (Yogyakarta: LKiS, 2012), 198-203.

sama lain. Perbedaan jenis kelamin menimbulkan perbedaan pemberian pelayanan, perbedaan pemberian hak dan kewajiban terhadap laki-laki dan kewajiban perempuan, sehingga tidak mungkin adanya kesetaraan antara keduanya. Sedangkan teori *nurture* menyatakan bahwa kesepakatan antara perbedaan jenis kelamin tidak perlu mengakibatkan perbedaan peran dan perilaku gender dalam tataran sosial dan menganggap gender adalah konstruksi sosial budaya.²⁶

Adapun konsep feminisme dalam Islam tentu saja tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan feminis yang berasal dari Barat, khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Di sisi lain, feminisme Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki, yang terabaikan di kalangan tradisional konservatif yang menganggap perempuan sebagai subordinat laki-laki.²⁷ Dengan demikian, feminisme Islam melangkah dengan menengahi kelompok tradisional-konservatif di satu pihak dan pro feminisme modern di pihak lain.

Prinsip dasar Islam adalah persamaan manusia tanpa memandang jenis kelamin, suku, bangsa, warna kulit, dan keturunan. Perbedaan derajat dipandang di sisi Tuhan terletak pada tataran pengabdian (ketaqwaan)nya kepada Allah (Q.S. al-Hujurat [49] ayat 13 dan Q.S. al-Ahzab [33] ayat 33-35).²⁸ Demikian pun persamaan dalam lapangan ekonomi, pendidikan dan relasi antara perempuan dan laki-laki (Q.S. an-Nisa [4] ayat 32; Q.S. Ali Imran [3] ayat 195 dan QS. al-Baqarah [2] ayat 228).²⁹ Dari segi kewajiban, Alquran telah menuntut perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) dengan melakukan kerja-kerja positif (Q.S. al-Nahl [16] ayat 71). Dengan demikian, perempuan dan laki-laki saling bahu-membahu membantu satu sama lain (Q.S. al-Thaubah [9] ayat 71).³⁰

Sesuai realitas yang ada, yaitu tidak terlepas dari dua alasan dan larangan keterlibatan perempuan dalam bidang kepemimpinan. *Pertama*, adanya ayat Alquran yang populer dijadikan rujukan, yaitu surah an-Nisa' ayat 34, yaitu **الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ** (kaum laki-laki dalam pemimpin bagi kaum wanita). Dalam ayat tersebut, kata “*qanwam*” diinterpretasikan oleh mufasir klasik bermacam-macam. Ibnu Abbas dengan “penguasa”

²⁶ Fadlan, *Op.Cit.*, 109

²⁷ Ariana Suryorini, *Menelaah Feminisme Dalam Islam* (Semarang: 2012), 24.

²⁸ Husein Muhammad, *Islam AgamaOp.Cit.*, 112.

²⁹ Sukron Kamil, *Pemikiran Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme dan Antikorupsi* (Jakarta: Kencana, 2013), 194-195.

³⁰ *Ibid*, Sukron Kamil, 203.

(*mushallatun*) karena laki-laki memiliki kelebihan akal dan kelebihan memperoleh harta (*ghanimah*) dan waris. Lebih jauh lagi, Al-Thabari mengartikan dengan “penanggungjawab” (*abl al-qiyam*), artinya, perempuan tidak berhak untuk menjadi pemimpin dan yang pantas atau layak untuk menjadi sosok pemimpin hanyalah dari kaum laki-laki saja. Sehingga, hal ini menyebabkan kaum perempuan kesulitan untuk mendapatkan posisi dalam dunia politik.³¹

Kedua, Hadist yang menyatakan³² لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan).³³ Kedua dalil ini mempunyai keterkaitan dalam memperkuat argumentasi ketidakbolehan dalam memegang kepemimpinan. Namun, dalam kalangan mufasir kontemporer melihat ayat dan Hadist tersebut tidak harus dipahami seperti itu.³⁴

Abbas Maqmur al-Aqdad menjadikan ayat ini sebagai afirmasi bahwa ada perbedaan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan yang bersifat alamiah (asal pembawaan alamiah dan asal tanggung jawab sosial). Oleh karena itu, hak kepemimpinan bersumber dari kesanggupan alamiah yang dimiliki oleh jenis kelamin laki-laki. Maka bagi al-Aqdad, hak atas kepemimpinan hanya bisa didapat oleh laki-laki.³⁵ Beberapa ahli Fikih klasik seperti Ibn Hazm, Abu Ya’la al-Farra dan al-Mawardi dalam menetapkan hukum tentang kepemimpinan mereka mensyaratkan agar seorang kepala negara tidak boleh perempuan. Alasannya adalah bahwa tugas seorang pemimpin sangat berat (menjaga eksistensi agama, ijtihad, mengimami Shalat, dan lain-lain).³⁶

³¹ Husein Muhammad, *Islam AgamaOp.Cit.*, 124.

³² Dari perspektif politik yang lebih luas, hadist ini juga harus dibaca dengan memperhitungkan faktor geo-politik. Jazirah Arabia yang dipimpin Nabi waktu itu diapit oleh dua kekaisaran besar, Romawi Timur yang beragama Nasrani dan Persia yang beragama Majusi. Seperti yang diisyaratkan dalam Alquran surah *al-Rum*, Nabi dan kaum mukmin jelas-jelas menunjukkan dukungan dan simpatinya kepada bangsa Romawi yang beragama Nasrani daripada bangsa Persia yang menyembah matahari. Dengan demikian kelahiran dan kemunculan hadist ini memiliki dimensi politis, yang terkait dengan analisis particular Nabi atas situasi aktual pada zamannya. Karena itu, hadist ini tidak bersifat universal, yang berlaku untuk kalangan semua ruang dan waktu. Lihat Fadlan, *Op.Cit.*, 125.

³³ Shohih Bukhori, Juz 82 dan sunan Tirmidzi, Bab al-Fitan, 75.

³⁴ Surah an-Nisa’ ayat 34 secara jelas menyajikan tentang pembagian kerja antara suami dan istri. Sementara hadist tersebut tidak digaris bawahi secara umum, yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Seperti yang telah diriwayatkan Bukhori, Ahmad, an-Nasa’i, dan Tirmidzi melalui Abu Bakrah. Ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putrid Kisrah sebagai penguasa mereka, lalu beliau bersabda : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ lihat Ach. Tirmidzi, *Kepemimpinan Perempuan* (Madura: 2015), 437

³⁵ M.N Ibad, *Kekuatan Perempuan Dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), 57-58.

³⁶ Fitriyani, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Paramadina Press, 2014), 8

Adapun Husein Muhammad menyatakan ayat ini bukanlah ayat normatif yang berlaku di segala zaman, karena Alquran sendiri tidak mengharuskan laki-laki menjadi pemimpin baik dalam ranah domestik maupun publik. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini konteks kepemimpinan dalam rumah tangga, walaupun ia tak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga bisa menjadi kepala rumah tangga.³⁷ Selaras dengan Gus Dur, dalam menafsirkan ayat ini berpegang pada pendapat bahwa laki-laki memiliki kelebihan dalam kekuatan fisik dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki bertanggung jawab atas keselamatan perempuan, karena tanggung jawabnya inilah laki-laki dijadikan sebagai pemimpin. Sedangkan dari segi yang lain tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.³⁸

Disetujui oleh Yusuf Qardhawi, ia menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara (*ri'asah daulah*), mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas, bahwa wanita itu memiliki kemampuan sempurna (*tamam al-abliyah*).³⁹ Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, mufti Mesir saat ini, termasuk di antara ulama berpengaruh yang membolehkan perempuan menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR dan lain-lain. Namun, ia sepakat dengan Yusuf Qardhawi bahwa kedudukan *Al-Imamah Al-Udzma* yang membawahi seluruh umat Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam shalat.⁴⁰

Islam memandang posisi laki-laki dan perempuan setara, meskipun dalam kadar tertentu diperlakukan berbeda. Pada dasarnya ditetapkan oleh Allah sebagai pencipta manusia, semata-mata demi kemaslahatan, kelestarian, dan kesucian hidup manusia dengan cara saling melengkapi dan bekerja sama sesuai aturan-aturan-Nya. Kemuliaan manusia tidak dilihat dari jenis kelamin atau kedudukan seseorang, tetapi dari kadar ketaqwaannya. Pada sektor publik atau di tengah-tengah masyarakat laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama, terutama dalam urusan dakwah dan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

³⁷ Greg Barton, *Op.Cit.*, 46.

³⁸ Perang yang terjadi adalah perang Jamal (berunta) yaitu perang anatar golongan Ali Bin Abi Thalib dengan 'Aisyah. Lihat M.N Ibad, *Op.Cit.*, 57-58.

³⁹ Fatwa Qardawi pada suatu program "*Fiqh al-Hayat*" yang diadakan tanggal 29 Agustus 2009. Fatwa serupa juga ditulis di kitabnya *Fatawa Muashirah*. Juga dimuat di situs resminya: <http://goo.gl/P3k8Nt>

⁴⁰ Husein Muhammad, *Islam AgamaOp.Cit.*, 128.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

“dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong dari sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah:71).

Termasuk dalam masalah politik, perempuan mempunyai hak yang sama sebagaimana seorang laki-laki. Secara historis, perempuan telah memainkan peranan yang sangat strategis pada masa awal maupun pertumbuhan dan perkembangan Islam, baik dalam urusan domestik maupun publik. Hal ini dibuktikan melalui fakta sejarah yang menunjukkan kesuksesan perempuan menjadi pemimpin. Salah satunya adalah Ratu Bilqis, penguasa negeri Saba yang kepemimpinannya dikenal sukses secara gemilang, keamanan negara terjamin dengan baik dan ekonominya makmur. Selain itu, Siti Khadijah seorang pengusaha yang sukses serta adanya suatu peranan ‘Aisyah istri Rasulullah, pernah memimpin pasukan dalam perang melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib.⁴¹ Keterlibatan ‘Aisyah dalam peperangan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi kaum muslimin dalam bidang politik praktis sekalipun.

Oleh sebagian kalangan, Islam sendiri dipandang membawa nilai-nilai kesetaraan gender. Dalam ayat-ayat Alquran ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama di hari pembalasan.⁴² Laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama (*nafsin wahidah*),⁴³ kemuliaan laki-laki dan perempuan sama dilihat dari prestasinya.⁴⁴

PEMIMPIN PEREMPUAN DI MENEJEMEN PENDIDIKAN ISLAM ALA GUS DUR

⁴¹ Fadlan, *Op.Cit.*, 111

⁴² Surah al-An’am [6] ayat 164, ayat yang senada dalam surah al-Mu’min [40] ayat 17, surah al-Muddatsir [74] ayat 78.

⁴³ Surah an-Nisa’ [4] ayat 1.

⁴⁴ Surah ali ‘Imran [3] ayat 195, ayat yang senada dalam surah an-Nahl [16] ayat 97, surah Al-Hujurat [49] ayat 14.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan tata kultural yang dikuasai oleh budaya *patriarki*, dalam arti kata lain, politik Indonesia masih mengakar pada kepemimpinan kaum pria. Sehingga, sulit bagi perempuan untuk mengutarakan pendapat mereka bahwa perempuan juga memiliki hak yang sederajat dengan pria dalam kepemimpinan politik. Tapi para feminis tidak begitu mudah menyerah dalam mengejar keinginan kepemimpinan mereka.⁴⁵

Sosok KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan inspirasi banyak orang. Gus Dur dikenal sebagai kiai yang memperjuangkan dan menegakkan isu-isu demokrasi, pluralisme dan HAM. Hal ini erat kaitannya dengan perjuangan beliau dalam membela kaum minoritas. Pemikiran dan perjuangannya didedikasikan untuk kaum lemah, termasuk kaum perempuan yang selama ini mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang. Gus Dur memberikan dukungan penuh terhadap perempuan sejak awal, perhatiannya terhadap keluarga dan perhatiannya terhadap negara dengan mengeluarkan program berperspektif gender.⁴⁶ Dengan demikian, Gus Dur berhimpun dengan perempuan dari berbagai latar belakang.

Gus Dur adalah tokoh *avant-garde* yang memperjuangkan hak-hak kaum minoritas di Indonesia.⁴⁷ Pembelaannya telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat nasional dan dunia internasional. Melekatnya feminisme dalam pandangan Gus Dur tidak terlepas dari aksi dan pemikirannya yang disumbangkan atas nama kebersamaan tanpa memandang etnis. Jika dicermati, perjalanan karier dan kecendekiawanan Gus Dur juga tidak bisa lepas dari perempuan. Selain istri, Gus Dur memiliki empat putri. Bahkan publik mengenal salah satu putri Gus Dur, Yeni Wahid sebagai salah satu tokoh politik dan pemikiran Islam modern.⁴⁸

⁴⁵ Siti Muslikhat, *Feminism dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 139.

⁴⁶ Pada saat Gus Dur menjabat sebagai ketua PBNU, beliau melakukan upaya-upaya legitimasi peran politik perempuan secara formal, adanya keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdatul Ulama Nomor 004/Munas/11/1997. Pada 17-21 November 1997 di Lombok, tentang “Kedudukan Perempuan Dalam Islam”. Diantara keputusan tersebut yaitu, (1) Mengaku bahwa : “Islam memberikan hak-hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Qur’an dan hadist, namun dalam kenyataannya pengaruh budaya patriarkhi telah mendistorsi prinsip tersebut sehingga menjadi perempuan tersubordinasi dalam peran-peran public”, (2) dalam konteks peran publik menurut prinsip Islam, perempuan diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut. Keputusan tersebut menjadi entry-point serta sumber legitimasi secara yuridis yang sah bagi gerakan perempuan. (dalam “*Gus Dur, Sang Feminis*” oleh Ala’I Nadjib, 4).

⁴⁷ Ahmad Khotim Muzakka, *Gus Dur Menulis Gus Dur Ditulis* (Jawa Pos: 2015), 2.

⁴⁸ Surahmat, *Jejak Pemikiran Feminisme Gus Dur* (Semarang: RBSS, 2009), 2.

Konstelasi pemikiran feminis Gus Dur berlandaskan dua sumber, yakni Pancasila dan Teologis. Pancasila sebagai landasan filosofis bernegara, sila “kemanusiaan yang adil dan beradap” menjadi landasan perempuan mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki secara yuridis maupun konstituante. Aspek teologis yang berlandaskan *kulliyatul khams* (lima hak dasar) dalam Islam meliputi; hak hidup (*hifdz al-nafs*), hak beragama (*hifdz al-din*), hak kepemilikan (*hifdz al-maal*), hak profesi (*hifdz al-irdl*) dan hak berkeluarga (*hifdz al-nasl*) yang ditetapkan sebagai tujuan utama syariah (*maqashid al-syari’ah*).⁴⁹ Perlindungan atas hak dasar inilah, Gus Dur menyebutnya sebagai universalisme Islam, yang merupakan salah satu ilmu yang diciptakan para ulama berdasarkan Alquran dan hadis. Sebab itu pula, dalam konstruksi feminisme yang dibangun Gus Dur terdapat dua gagasan, yakni nasionalis dan religius.

Bagi Gus Dur, Islam tidak membedakan peran publik perempuan dan laki-laki. Perbedaan laki-laki dan perempuan hanyalah bersifat biologis, tidak bersifat institusional atau kelembagaan sebagaimana disangkakan banyak orang dalam literatur Islam klasik. Jika ada ayat atau pun hadis yang diskriminatif terhadap perempuan, harus dipahami secara cermat dalam kapasitas; apakah Muhammad sebagai salah satu orang Arab dengan segala setting kulturalnya, atau apakah Muhammad sebagai Rasul yang membawa pesan-pesan Ketuhanan.⁵⁰

Mengenai adanya Q.S. al-Nisa’ ayat 34 yang menjelaskan bahwa kaum laki-laki lebih tegak atas wanita, Gus Dur mengatakan bahwa sebetulnya ayat tersebut dapat diartikan dalam dua kategori. *Pertama*, lelaki bertanggungjawab secara fisik atas keselamatan wanita. *Kedua*, lelaki lebih pantas menjadi pemimpin negara. Selain itu Gus Dur juga menambahkan bahwa, ternyata para pemimpin politik Islam lebih memilih pendapat yang kedua, terbukti dari ucapan mereka di muka umum.⁵¹

Dari penafsiran tersebut, menunjukkan bahwa Gus Dur mengakui kalau laki-laki memiliki kekuatan fisik yang lebih daripada perempuan. Oleh sebab itu, laki-laki harus bertanggung jawab atas keselamatan fisik perempuan. Jadi, yang membedakan antara laki-

⁴⁹ Amina Wadud, *Qur’an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan* (Jakarta: Serambi, 2006), 17.

⁵⁰ Nuruzzaman, Jalal, dkk., *Pengantar Editor dalam buku Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: Lkis, 2004), 34.

⁵¹ Abbas Mahmud al-Aqqad, *Filsafat Alquran: Filsafat, Spiritual dan Sosial dalam Isyarat Alquran* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 73-74.

laki dan perempuan hanyalah dari segi biologis. Sedang dalam segi psikologis, tidak ada perbedaan antara keduanya. Semuanya itu memiliki kekuatan yang sama secara psikologis.⁵²

Menurut Gus Dur, tidak ada satu pun *nash* Alquran dan hadits yang melarang perempuan untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariah seperti a) tidak boleh ada *kehalwat* (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram, 2) tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dan 3) harus tetap menjaga perilaku Islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku dan lain-lain.⁵³

Adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa wacana feminisme di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan pandangan Islam, lebih banyak disuarakan oleh kalangan aktivis Nahdlatul Ulama (NU), baik perempuan maupun laki-laki. Harus diakui, bahwa Gus Dur secara personal melahirkan begitu banyak pemikiran dan inisiatif baru terkait upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender serta perbaikan status dan posisi perempuan.⁵⁴ Misalnya, pandangan Gus Dur yang amat fundamental menolak perilaku kekerasan terhadap perempuan, termasuk poligami, membela nasib buruh perempuan serta menolak UU Pornografi dan Porno aksi, karena RUU tersebut justru berpotensi menjebak perempuan dalam dilema peran sosial.⁵⁵

Gus Dur telah merefleksikan pemikiran dan keberpihakannya terhadap kondisi perempuan Indonesia yang terkena budaya patriarki dan menempatkan perempuan sebagai warga Negara kelas kedua atau *second sex*. Pemikiran beliau tentang adil gender, juga diaplikasikan pada sejumlah produk kebijakan ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia periode 1999-2001. Ia memperkenalkan kata gender dalam GBHN 1999-2004, dijabarkan dalam UU No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004. UU tersebut juga sebagai salah satu upaya merespons Konferensi Beijing.⁵⁶

⁵² Surahmat, *Op.Cit.*, 5.

⁵³ Musdah Mulia, *Hukum Islam dan Dinamika Feminisme dalam Organisasi Nahdlatul Ulama*, dalam *Jurnal al-Ahkam* Volume 23, Nomor 1, April 2013, 51.

⁵⁴ Abbas Mahmud al-Aqqad, *Op.Cit.*, 82.

⁵⁵ Aminah, *Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana di Nahdlatul Ulama (NU)*, dalam *Jurnal ADDIN*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

⁵⁶ Ala'i Nadjib, *Gus Dur di Mata Perempuan* (Yogyakarta: 2014), 52.

Selain itu, beliau dengan tegas melahirkan inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (kebijakan PUG). Dimana Inpres tersebut menjadi cikal bakal masuknya nafas kesetaraan dan keadilan gender dalam tiap kebijakan dan program pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Pada masa jabatannya, beliau juga mengubah nomenklatur Kementerian Urusan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan misi yang amat kuat untuk membangun kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui program pemerintah di seluruh aspeknya. Karena itu, tidak salah jika Gus Dur disebut sebagai pionir feminis, khususnya di lingkungan organisasi NU.⁵⁷

Ide dan gagasan feminisme dari tokoh Gus Dur inilah yang ingin melepaskan perempuan dari penindasan harkat kemanusiaannya sangat kompatibel dengan ajaran Islam yang intinya adalah membangun keadilan bagi semua manusia. Secara substantif, Gus Dur tidak memiliki keberatan teologis mengenai isu perempuan sebagai pemimpin.⁵⁸ Gus Dur juga dianggap dapat menyelesaikan rumusan dan praksis antara teologi Islam dan Kristen di Indonesia yang bergelut dengan masalah ketidakadilan, kemiskinan, kekerasan, dan diskriminasi, serta fanatisme primordial berbasis etnis, ras dan agama. Artinya, kredibilitas dan kualitas Gus Dur diakui mewakili pemahaman (masyarakat) tradisional religius (Islam).

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM MENEJEMEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Dalam Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara dalam no.27/KEP/1972 disebutkan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dibawa turut serta dalam suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.02/SE/1980 ialah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara optimal.

Menurut Husaini Usman bahwa salah satu kunci yang sangat menentukan keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya adalah kepala sekolah. Keberhasilan kepala sekolah dalam mencapai tujuannya secara dominan ditentukan oleh keandalan

⁵⁷ Musdah Mulia, *Op.Cit.*, 55.

⁵⁸ Musdah Mulia, *Op.Cit.*, 58.

manajemen sekolah yang bersangkutan, sedangkan keandalan manajemen sekolah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan kepala sekolahnya.⁵⁹

Pernyataan di atas didukung oleh studi yang dilakukan oleh Gilberg Austin terhadap semua kepala sekolah di Negara bagian Maryland, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa perbedaan antara sekolah yang berprestasi tinggi dan yang rendah disebabkan oleh adanya pengaruh kepala sekolahnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Ruth Love dalam Edward Deroche (1996) yang menyatakan, "*I never seen a good school without a good principals*". Hal yang hampir sama di kemukakan oleh James B. Conant dalam Edward Deroche (1996) yang menyatakan, "*the difference between a good and a poor school is often the difference between a good and a poor principals*." Dan hasil riset Wallcot (1993) menyimpulkan bahwa kepala sekolah memainkan peranan penting terhadap efektivitas sekolah.

Pada era sekarang ini, sosok kepemimpinan pendidikan yang dibutuhkan adalah sosok pemimpin yang mampu menyejajarkan lembaga yang dipimpinnya dengan lembaga-lembaga pendidikan yang unggul dan berkualitas. Dengan demikian maka dibutuhkan seorang kepala sekolah yang profesional, memiliki wawasan luas, pengalaman, tanggung jawab, komitmen, bisa kerja sama dengan siapa pun, pekerja keras, cermat dan teliti.

Dari beberapa kebijakan di atas tidaklah dibedakan prasyarat menjadi kepala sekolah berdasarkan jenis kelamin, bahwa siapa pun bisa menjadi pemimpin di lembaga pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan, selama memenuhi kelayakan dan kriteria syarat menjadi kepala sekolah. Lalu apakah ada perbedaan antara kepemimpinan perempuan dengan kepemimpinan laki-laki dalam pencapaian tujuan lembaga.

Dalam hal kepemimpinan lembaga pendidikan, Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memberikan hak yang sama dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945, pasal 31 ayat 1,..."*Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran*". Yang dimaksud warga negara di sini adalah tidak terbatas laki-laki saja tetapi juga perempuan. Hal ini dipertegas lagi dengan ketetapan GBHN 1988 dan GBHN 1993 yang memberikan kesempatan dan peluang bagi kaum perempuan dalam kepemimpinan, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial budaya yang terbuka luas dan adil sama dengan mitranya kaum laki-laki.

⁵⁹ Husaini Usman, h. 302.

Dari kebijakan di atas terlihat betapa pentingnya perempuan mendapatkan kesempatan dan akses dalam bidang pendidikan yang seluas-luasnya, terutama pendidikan tinggi. Karena pendidikan merupakan proses penting dalam mempersiapkan masa depan bangsa. Perempuan yang berpendidikan tinggi akan mempersiapkan anak-anaknya dengan persiapan lebih baik dan lebih verbal dari pada perempuan yang berpendidikan rendah atau yang tidak berpendidikan sama sekali. Di samping itu taraf keluasan ilmu pengetahuan dan pergaulan hidup yang dimiliki perempuan berdampak luas pula terhadap pola pikir dan rasa serta struktur kepribadian kaum perempuan dan sikap dalam kehidupan mereka.

Namun pada kenyataannya masih tetap terdapat pandangan tradisional yang mengecilkan hak perempuan dan memosisikannya sebagai makhluk yang lemah, halus dan emosional dan harus dilindungi oleh laki-laki. Sementara laki-laki digambarkan sebagai sosok yang gagah, berani dan rasional. Hal ini merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi adanya anggapan bahwa kaum laki-laki lebih pantas memimpin dari pada perempuan, bahkan terjadinya penolakan terhadap peran kepemimpinan perempuan dalam lembaga pendidikan, dan lebih memfokuskan pada peran laki-laki dalam organisasi⁶⁰

Namun pandangan ini dibantah oleh hasil penelitian Dennis Haruna⁶¹(2009) tentang *model kepemimpinan perempuan dalam lembaga pendidikan Islam* bahwa dalam hal sifat dan sikap, Kepala sekolah MTs Negeri Yogyakarta 1 adalah seorang perempuan mempunyai jiwa yang tegas dalam menegakkan aturan sekolah, memiliki kepribadian yang baik, memiliki kedisiplinan yang tinggi, bersikap hati-hati dalam membuat keputusan bersama, sabar, patuh terhadap atasan dan tanggung jawab. Dalam hal profesionalitas kinerjanya, pengalaman yang mumpuni dengan menjabat dua kali periode sebagai kepala sekolah, menegakkan aturan sekolah kepada semua masyarakat sekolah termasuk dirinya, terus melakukan pembangunan sarana sekolah, seperti laboratorium, masjid, komunikasi yang dijalin dengan guru dan pegawai cukup baik.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa dari segi sifat dan sikap, tidak bisa digeneralisir bahwa perempuan dalam kepemimpinannya adalah makhluk yang lemah,

⁶⁰ Menurut Schmuck yang dikutip oleh Tony Bush & Marianne Coleman, *Manajemen Strategis Kepemimpinan Pendidikan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2008), Cet. II; Terjemahan Fahrurrozi, h. 94

⁶¹ Dennis Haruna, Skripsi; *Model Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Pendidikan Islam* (Studi kasus Kepala sekolah MTs Negeri Yogyakarta 1(2009), hal. 54

emosional, dan tidak tegas dalam mengambil keputusan. Karena hal ini dibuktikan dalam penelitian dengan memperlihatkan kedisiplinan yang tinggi, bersikap hati-hati dalam membuat keputusan bersama, sabar, patuh terhadap atasan dan tanggung jawab serta dikuasakan kesempatan menjabat dua kali periode sebagai kepala sekolah.

Menurut Imroah Khakimah (2006) bahwa siapa saja bisa menjadi pemimpin selama ia berlatih terus menerus dalam penguasaan kompetensinya melalui pelatihan *on job* maupun *off job*. Perempuan dengan sifat femininnya akan menjadi model kepemimpinan yang efektif dan berhasil meningkatkan kinerja karyawannya. Namun di sisi lain pandangan maskulinitas seperti *iron maiden* (keras dan kaku) bukanlah gaya yang secara optimal untuk meningkatkan kinerja karyawan.

Shoya Zichy dalam bukunya *Women and the Leadership Question*⁶² mencoba mengupas delapan tipe kepemimpinan wanita yaitu: tipe *trustees* (kepercayaan), tipe *conservator* (yang memelihara), tipe *tactician* (yang mengutamakan taktik), tipe *realistic* (yang mengutamakan kenyataan yang realistis di lapangan), tipe *strategic* (yang mengutamakan langkah rasional untuk menguasai keadaan), tipe *innovator* (yang mengutamakan inovasi - inovasi dalam memecahkan masalah), tipe *mentor* (yang memberikan tekanan kepada motivasi yang diberikan kepada pengikut), dan tipe *advocator* (yang memfokuskan pada upaya memotivasi para pengikut dengan ide-ide atau petunjuk yang cemerlang).

Namun Shoya Zichy menegaskan bahwa setiap pemimpin memiliki *blind spot* sebagai titik hitam kelemahan yang merupakan bagian dari sifat-sifat manusiawi. Ada *blind spot* yang muncul dalam bentuk sikap senang disanjung sehingga kadang-kadang berakibat fatal karena keputusannya banyak bergantung kepada apresiasi sekitarnya yang belum tentu obyektif. Ada pula *blind spot* yang muncul pada pemimpin wanita dalam bentuk suka mencampuri dan mengurus hal-hal pribadi sampai yang sekecil-kecilnya, seperti yang disampaikan oleh sekitar 56% responden, dan sering muncul pula sikap “cemburu” kepada anggota organisasi sesama wanita yang lebih berprestasi sekitar 11% responden dari 78 kuesioner yang penulis sebarakan.

Menurut hemat penulis bahwa dari hasil penelitian tersebut perlu diadakan penelitian lanjutan tentang apakah seberapa besarkah *blind spot* yang dimiliki antara kepemimpinan laki-laki dengan perempuan. Hasilnya akan memaparkan tentang tingkat keidealan

⁶²Martha Tilaar dan Wulan Tilaar, . . . hal. 28–30

kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan, sehingga hal ini akan memperkuat pandangan tentang boleh-tidaknya perempuan menjadi pemimpin dalam lembaga Islam.

Selanjutnya hasil penelitian di Inggris oleh Jirasing hedan Lyons tentang kepala-kepala sekolah dasar dan menengah, yang menyebutkan bahwa kepala-kepala sekolah perempuan lebih mendeskripsikan dirinya sebagai sosok yang lebih, supel, demokratis, perhatian, artistik, bersikap baik, cermat dan teliti dan berperasaan dan berhati-hati.⁶³

Dari hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pada prinsipnya siapa pun menjadi pemimpin, akan merasakan ketegangan dalam kepemimpinannya. Oleh karenanya, pemimpin wanita harus mampu membuka rentang perbedaan gender, membangun harapan-harapan dan membentuk strategi untuk menunjukkan kesejatian eksistensi, seperti kewibawaan, wawasan, empati, daya sekolah dan referensi tindakan referensi tindakan⁶⁴

SIMPULAN

Relasi gender yang kurang adil dalam masyarakat adalah kenyataan yang menyimpang dari spirit Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan dan keharmonisan. Adapun ayat dan hadits yang berkaitan dengan kepemimpinan politik perempuan bersifat khilafiah, sehingga tidak bisa dipaksakan adanya *qaul* atau tafsir tunggal yang berlaku universal. Pemikiran nasionalis-*religius*, antara teologi, budaya dan politik yang selama ini berjarak dalam memandang persoalan gender lebur dalam pemikiran Gus Dur. Kebolehan pemimpin perempuan menurut Gus Dur bukan terletak pada perbedaan jenis kelamin, melainkan karena potensi kemampuannya. Sedangkan Indonesia adalah negara demokrasi yang tidak membedakan warga negaranya berdasarkan kategori ras, etnis, maupun gender. Peran-peran publik bagi perempuan diperbolehkan sepanjang perempuan tersebut mempunyai kemampuan dengan tidak melupakan peran domestiknya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Gus Dur mengenai kepemimpinan bahwa negara akan lebih mudah mencapai tujuannya, jika perempuan memiliki kualitas yang lebih baik dan mumpuni, maka tidak adanya larangan bagi mereka untuk kemajuan seorang pemimpin dan negara. *Wallahu*

⁶³Tony Bush & Marianne Coleman, *Manajemen Strategis Kepemimpinan Pendidikan*. Terjemahan Fahrurrozi (Jogjakarta: IRCiSoD. 2006), hal. 101.

⁶⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Komunitas Pembelajar, Menjadi Komunitas Pembelajar: Kepemimpinan Transformasional dalam Komunitas Organisas Pembelajaran*. (Jakarta: Bumi Aksara 2003), h.121-130.

a'lam. Dalam konteks keindonesiaan masalah kepemimpinan seorang perempuan hendaknya juga dimaknai dengan melihat realitas masyarakat Indonesia. Apalagi dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945 kedudukan setiap warga Negara termasuk di dalamnya perempuan bersama hak-haknya (berpolitik) sangat dilindungi. Memilih ataupun dipilih sebagai pemimpin adalah hak setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UUD tak terkecuali bagi perempuan. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan kemampuan dalam kepemimpinan pendidikan antara kepemimpinan laki-laki dan perempuan, hanya saja perbedaannya pada faktor kesempatan yang datang kemudian. Jika perempuan Indonesia diberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya maka akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak kalah kuatnya dengan pemimpin perempuan di negara asing lainnya. Namun bias gender yang muncul dalam kepemimpinan perempuan, harus tetap mendapat perhatian yang serius dan penelitian lebih mendalam terhadap fenomena- fenomena yang berkembang sebelum menjadi masalah sosial baru yang sulit diurai dan disembuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Aqqad, Abbas Mahmud. 1986. *Filsafat Alquran: Filsafat, Spiritual dan Sosial dalam Isyarat Alquran* (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Albert Rika Pratiwi, dkk. 1998. *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*, (Yogyakarta: Kanisius)
- Aminah, *Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana di Nahdlatul Ulama (NU)*, dalam Jurnal ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.
- Barton, Greg. 2011. *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LkiS)
- Bukhori, Shohih. Juz 82 dan sunan Tirmidzi, dalam *Bab al-Fitan*
- Fatwa Qardawi. 2009. dalam kitab *Fatama Muashirah*. Juga dimuat di situs resminya: <http://goo.gl/P3k8Nt>
- Fitriyani. 2014. *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Paramadina Press)
- Hadiz, Liza. 2004. *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Kumpulan Artikel Prisma* (Jakarta: Pustaka LP3ES)
- Hasan, Abdul Wahid. 2015. *Gus Dur Mengarungi Jagat Sepiritual Sang Guru Besar* (Yogyakarta: IRCiSoD)

- Ibad, M.N. 2011. *Kekuatan Perempuan Dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren)
- Jendrius, *Rekonstruksi Peran Perempuan dalam Politik* dalam Jurnal Antropologi Vol.8, 2004
- Kamil, Sukron. 2013. *Pemikiran Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariat dan HAM, Fundamentalisme dan Antikorupsi* (Jakarta: Kencana)
- Mulia, Musdah. *Hukum Islam dan Dinamika Feminisme dalam Organisasi Nahdlatul Ulama'*, dalam Jurnal al-Ahkam Volume 23, Nomor 1, April 2013.
- Muhammad, Husein. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: Lkis)
- _____. 2012. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. ke-6 (Yogyakarta: LKiS)
- Muslikhat, Siti. 2004. *Feminism dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani)
- Muzakka, Ahmad Khotim. 2015. *Gus Dur Menulis Gus Dur Ditulis* (Jawa Pos)
- Nadjib, Ala'I. 2014. *Gus Dur di Mata Perempuan* (Yogyakarta)
- Nuruzzaman, Jalal, dkk. 2004. *Pengantar Editor dalam buku Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: Lkis)
- Septiana, Egi. *Catatan Gusdur* (Bandung: Pers Ebook369)
- Sholeh, Moh. Badrus. 2013. *Mengenal Pemikiran Gus Dur* (Jember: YPI At-Tauhid Press).
- Surahmat. 2009. *Jejak Pemikiran Feminisme Gus Dur* (Semarang: RBSS)
- Suryorini, Ariana. 2012. *Menelaah Feminisme Dalam Islam* (Semarang)
- Tim INCRes. 2000 *Beyond The Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur* (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Tirmidzi. 2015. *Kepemimpinan Perempuan* (Madura)
- Umah, Nandirotul. 2014. *Pendidikan Islam di Indonesia Dalam Perspektif Gus Dur* (Yogyakarta: Salatiga)
- _____. 2014. *Sketsa Biografi dan Intelektual Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: Salatiga)
- Wadud, Amina. 2006. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan* (Jakarta: Serambi)